



PENGABDIAN AKADEMISI MELALUI PENGUATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI SEBAGAI PEMBANDING PADA FORUM PERANGKAT DAERAH

Yupiter Mendrofa¹⁾

¹⁾ Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Nias, Gunungsitoli, Indonesia

Email: yupiter@unias.ac.id

Abstract

This community service activity aimed to strengthen the quality of regional economic development planning through the involvement of academics as resource persons and reviewers in the Regional Apparatus Forum for the 2027 Regional Government Work Plan (RKPD) of Gunungsitoli City. The activity employed a participatory approach consisting of coordination, presentations, discussions, evaluations, and the provision of recommendations on development programs proposed by Regional Apparatus Organizations (OPDs). The implementation method included preparation, forum implementation, mentoring, evaluation, and documentation stages. The results demonstrated that the involvement of academics positively contributed to improving the quality of regional economic planning by refining performance indicators, strengthening inter-agency program synchronization, promoting evidence-based planning, and establishing more focused development priorities. Furthermore, the activity enhanced the capacity of regional government officials in preparing planning documents that are more effective, efficient, and accountable. Sustainable collaboration between higher education institutions and local governments is expected to support the implementation of good governance and promote sustainable regional economic development.

Keywords: community service; Regional Government Work Plan (RKPD); economic development; Regional Apparatus Forum; development planning.

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kualitas perencanaan pembangunan bidang ekonomi melalui keterlibatan akademisi sebagai narasumber dan pembanding pada Forum Perangkat Daerah Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Gunungsitoli Tahun 2027. Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif melalui koordinasi, penyampaian materi, diskusi, evaluasi, dan pemberian rekomendasi terhadap program dan kegiatan yang dipaparkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Metode pelaksanaan meliputi tahap persiapan, pelaksanaan forum, pendampingan, evaluasi, dan dokumentasi kegiatan. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa keterlibatan akademisi memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas penyusunan program pembangunan bidang ekonomi melalui penyempurnaan indikator kinerja, penguatan sinkronisasi antarperangkat daerah, penyusunan program berbasis data (*evidence-based planning*), serta penetapan prioritas pembangunan yang lebih terarah. Selain itu, kegiatan ini meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah diharapkan dapat terus ditingkatkan sebagai upaya mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Kata Kunci: pengabdian kepada masyarakat; RKPD; pembangunan ekonomi; Forum Perangkat Daerah; perencanaan pembangunan.



PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan proses yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan yang efektif adalah penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD menjadi pedoman bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merumuskan program, kegiatan, indikator kinerja, dan alokasi anggaran yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional maupun daerah (Republik Indonesia, 2004; Republik Indonesia, 2022).

Forum Perangkat Daerah merupakan tahapan strategis dalam proses penyusunan RKPD karena menjadi wadah koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, dan penyempurnaan rancangan rencana kerja masing-masing perangkat daerah. Melalui forum tersebut, setiap OPD mempresentasikan program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya sehingga memperoleh masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, praktisi, dan unsur masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif, akuntabel, dan berbasis kebutuhan masyarakat (Bappenas, 2020).

Dalam perspektif pembangunan ekonomi daerah, kualitas perencanaan memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Perencanaan yang disusun secara komprehensif akan menghasilkan kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya saing daerah, serta mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial. Sebaliknya, perencanaan yang kurang terintegrasi berpotensi menimbulkan tumpang tindih program, inefisiensi anggaran, dan rendahnya pencapaian indikator pembangunan daerah (Arsyad, 2016; Todaro & Smith, 2021).

Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, salah satunya melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, peran akademisi tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan pendidikan dan penelitian, tetapi juga memberikan kontribusi nyata berupa pendampingan, konsultasi, transfer pengetahuan, serta rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah. Keterlibatan akademisi dalam Forum Perangkat Daerah menjadi bentuk implementasi pengabdian kepada masyarakat melalui pemberian masukan ilmiah yang didasarkan pada teori, hasil penelitian, dan pengalaman praktis dalam bidang ekonomi pembangunan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012).

Pada penyusunan RKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2027, kegiatan Forum Perangkat Daerah menghadirkan akademisi sebagai narasumber sekaligus pembanding pada bidang ekonomi. Peran tersebut diarahkan untuk

memberikan evaluasi terhadap kesesuaian program yang diusulkan oleh masing-masing OPD dengan arah kebijakan pembangunan daerah, target indikator makro ekonomi, prioritas pembangunan nasional, serta prinsip efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan pembangunan. Melalui kegiatan ini diharapkan terjadi peningkatan kualitas dokumen perencanaan sehingga program pembangunan yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kota Gunungsitoli.

Selain memberikan masukan terhadap substansi program, kegiatan ini juga menjadi media transfer pengetahuan mengenai pendekatan perencanaan berbasis data (*evidence-based planning*), penyelarasan indikator kinerja utama, penguatan analisis kebutuhan masyarakat, serta integrasi program lintas sektor. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep *good governance* yang menekankan pentingnya transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (UNDP, 1997; OECD, 2020).

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui partisipasi aktif akademisi sebagai pembanding dalam Forum Perangkat Daerah RKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2027 yang diikuti oleh kepala perangkat daerah beserta pejabat perencana dari berbagai OPD. Melalui forum tersebut dilakukan diskusi, pemberian masukan, evaluasi program, serta penyampaian rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan bidang ekonomi. Hasil kegiatan diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyusunan program pembangunan bidang ekonomi melalui pemberian masukan akademik pada Forum Perangkat Daerah RKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2027. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam menyusun program yang lebih terarah, terukur, berbasis data, dan selaras dengan sasaran pembangunan daerah maupun nasional.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk pendampingan akademik dan pemberian masukan sebagai narasumber/pembanding pada Forum Perangkat Daerah Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Gunungsitoli Tahun 2027. Sasaran kegiatan adalah para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pejabat perencana, serta tim penyusun RKPD di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli. Metode pelaksanaan dirancang secara partisipatif agar tercipta komunikasi dua arah antara akademisi dan pemerintah daerah dalam menghasilkan perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang berkualitas.

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas beberapa tahapan sebagai berikut.



1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan diawali dengan koordinasi bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Gunungsitoli mengenai jadwal pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, ruang lingkup pembahasan, serta perangkat daerah yang menjadi peserta forum. Selanjutnya dilakukan identifikasi dokumen perencanaan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja) OPD, serta arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah sebagai bahan kajian sebelum pelaksanaan forum.

2. Tahap Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

Pada tahap ini akademisi berperan sebagai narasumber sekaligus pembanding dalam Forum Perangkat Daerah bidang ekonomi. Masing-masing OPD memaparkan rancangan program, kegiatan, indikator kinerja, target capaian, serta kebutuhan pendanaan yang akan diusulkan dalam RKPD Tahun 2027.

Setelah setiap pemaparan, dilakukan proses pembahasan melalui:

- analisis kesesuaian program dengan prioritas pembangunan daerah;
- evaluasi keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja;
- pemberian masukan terhadap efektivitas dan efisiensi program;
- identifikasi potensi tumpang tindih antarprogram maupun antarperangkat daerah;
- penyampaian rekomendasi untuk meningkatkan kualitas program pembangunan bidang ekonomi.

Metode yang digunakan berupa ceramah ilmiah, diskusi partisipatif, presentasi, dan konsultasi langsung (focus group discussion/FGD) sehingga setiap perangkat daerah memperoleh umpan balik secara langsung terhadap program yang diusulkan.

3. Tahap Pendampingan dan Evaluasi

Setelah seluruh OPD mempresentasikan rencana kerjanya, dilakukan proses evaluasi terhadap hasil pembahasan. Evaluasi difokuskan pada tingkat kesesuaian program dengan arah kebijakan pembangunan daerah, keterpaduan antarperangkat daerah, serta pencapaian indikator pembangunan ekonomi.

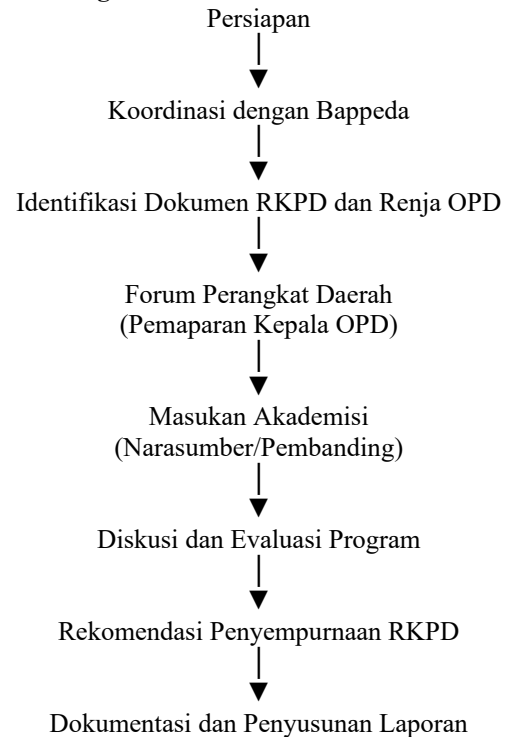
Rekomendasi yang dihasilkan dalam forum disampaikan kepada perangkat daerah sebagai bahan penyempurnaan dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD sebelum ditetapkan menjadi bagian dari RKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2027.

4. Tahap Dokumentasi dan Pelaporan

Tahap akhir meliputi penyusunan dokumentasi kegiatan, pengumpulan notulen forum, dokumentasi foto, daftar hadir peserta, serta penyusunan laporan pengabdian kepada masyarakat yang menjadi dasar penyusunan artikel ilmiah. Seluruh hasil rekomendasi dianalisis secara

deskriptif untuk menggambarkan kontribusi akademisi dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan bidang ekonomi.

Diagram Alur Metode Pelaksanaan



Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam kegiatan pengabdian diperoleh melalui:

- Observasi langsung**, yaitu mengamati jalannya Forum Perangkat Daerah serta proses pemaparan program oleh masing-masing OPD.
- Studi dokumentasi**, berupa telaah terhadap dokumen RKPD, Renja OPD, RPJMD, berita acara forum, notulen rapat, dan bahan presentasi peserta.
- Diskusi interaktif**, yaitu proses tanya jawab dan pemberian masukan antara akademisi dengan peserta forum untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai perencanaan pembangunan bidang ekonomi.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan hasil observasi, hasil diskusi, dan rekomendasi yang diberikan selama pelaksanaan Forum Perangkat Daerah. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga diperoleh gambaran mengenai kontribusi akademisi dalam meningkatkan kualitas penyusunan RKPD bidang ekonomi di Kota Gunungsitoli (Miles et al., 2014).



Gambar 1. Sedang mendengarkan paparan bidang ekonomi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan melalui partisipasi aktif akademisi sebagai narasumber dan pembanding pada Forum Perangkat Daerah Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Gunungsitoli Tahun 2027. Forum ini dihadiri oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pejabat perencana, unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan bertujuan untuk memberikan masukan akademik terhadap rancangan program dan kegiatan yang akan diimplementasikan pada tahun 2027, khususnya pada bidang ekonomi.

1. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Bidang Ekonomi

Pelaksanaan forum diawali dengan pemaparan rancangan Rencana Kerja (Renja) oleh masing-masing OPD sesuai tugas dan fungsi yang dimiliki. Setiap perangkat daerah menyampaikan program prioritas, indikator kinerja, target capaian, serta kebutuhan pendanaan yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2027. Selanjutnya dilakukan sesi diskusi yang melibatkan akademisi sebagai pembanding untuk memberikan telaah terhadap kesesuaian program dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Peran akademisi tidak hanya memberikan tanggapan terhadap substansi program, tetapi juga mengevaluasi keterkaitan antara tujuan pembangunan daerah, indikator makro ekonomi, sasaran pembangunan, serta efektivitas program yang dirancang. Pendekatan ini bertujuan agar program pembangunan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih tepat sasaran dan berbasis data (evidence-based planning) (Bappenas, 2020).

2. Analisis Hasil Pembahasan Program Bidang Ekonomi

Berdasarkan hasil diskusi selama forum, ditemukan bahwa sebagian besar OPD telah menyusun program yang mengacu pada prioritas pembangunan daerah. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penyempurnaan, antara lain:

- kesesuaian indikator kinerja dengan tujuan program;
- sinkronisasi antarprogram lintas perangkat daerah;

- penentuan target yang lebih terukur;
- penguatan dasar analisis kebutuhan masyarakat;
- penyesuaian alokasi anggaran berdasarkan skala prioritas.

Masukan yang diberikan akademisi menitikberatkan pada pentingnya penyusunan program yang berorientasi pada hasil (outcome) dibandingkan hanya pada keluaran (output). Selain itu, indikator kinerja disarankan menggunakan ukuran yang dapat dievaluasi secara kuantitatif sehingga memudahkan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan program (Permendagri Nomor 86 Tahun 2022).

Sebagai contoh, beberapa program yang berkaitan dengan pengembangan UMKM dan peningkatan investasi daerah direkomendasikan untuk memiliki indikator seperti:

- peningkatan jumlah pelaku UMKM binaan;
- pertumbuhan investasi daerah;
- peningkatan nilai produksi usaha mikro;
- peningkatan penyerapan tenaga kerja;
- peningkatan kontribusi sektor ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Kontribusi Akademisi dalam Penyempurnaan Dokumen RKPD

Keterlibatan akademisi memberikan nilai tambah terhadap proses penyusunan RKPD. Masukan yang diberikan didasarkan pada teori ekonomi pembangunan, hasil penelitian, serta pengalaman empiris sehingga mampu memperkuat kualitas dokumen perencanaan.

Kontribusi akademisi selama kegiatan meliputi:

- mengevaluasi kesesuaian program dengan visi dan misi kepala daerah;
- memberikan rekomendasi terhadap prioritas pembangunan bidang ekonomi;
- mengidentifikasi potensi tumpang tindih program antar-OPD;
- mendorong penggunaan data statistik sebagai dasar penyusunan program;
- memberikan alternatif strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep collaborative governance, yaitu kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pemangku kepentingan dalam menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif dan berkualitas (Ansell & Gash, 2008).

4. Dampak Kegiatan Pengabdian terhadap Perencanaan Pembangunan

Kegiatan pengabdian memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, khususnya dalam menyusun program pembangunan yang lebih terarah dan terukur. Selama proses diskusi, peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya penyusunan indikator kinerja yang spesifik, realistis, serta sesuai dengan arah pembangunan ekonomi daerah.

Selain itu, forum juga menghasilkan beberapa rekomendasi strategis, di antaranya:



- meningkatkan sinkronisasi program antarperangkat daerah;
- memperkuat penggunaan data statistik dan hasil kajian akademik sebagai dasar penyusunan program;
- meningkatkan fokus program pada pengembangan sektor ekonomi unggulan daerah;
- mendorong efisiensi penggunaan anggaran melalui penetapan prioritas pembangunan;
- memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi mampu meningkatkan kualitas proses perencanaan pembangunan. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa keterlibatan akademisi dalam proses perumusan kebijakan publik dapat meningkatkan kualitas keputusan, memperkuat dasar ilmiah kebijakan, dan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (Bryson et al., 2017).

5. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Secara umum, pelaksanaan kegiatan berlangsung dengan baik. Peserta forum menunjukkan partisipasi aktif melalui penyampaian pertanyaan, diskusi, dan penyampaian berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan program pembangunan.

Beberapa faktor pendukung keberhasilan kegiatan antara lain:

- dukungan penuh dari Pemerintah Kota Gunungsitoli;
- keterbukaan peserta terhadap masukan akademik;
- tersedianya dokumen perencanaan sebagai bahan evaluasi;
- komunikasi yang baik antara akademisi dan perangkat daerah.

Adapun kendala yang ditemui selama pelaksanaan kegiatan meliputi keterbatasan waktu pembahasan setiap perangkat daerah dan beragamnya karakteristik program yang memerlukan analisis lebih mendalam. Meskipun demikian, seluruh rekomendasi berhasil didokumentasikan sebagai bahan penyempurnaan dokumen RKPDP Tahun 2027.

Tabel 1. Rekomendasi Hasil Pengabdian

Permasalahan	Rekomendasi Akademisi	Luaran yang Diharapkan
Indikator program belum terukur	Menyusun indikator berbasis outcome	Program lebih mudah dievaluasi
Program antar-OPD belum sinkron	Penguatan koordinasi lintas sektor	Efektivitas pembangunan meningkat
Prioritas program belum optimal	Penyusunan berdasarkan data	Program lebih tepat sasaran

	dan kebutuhan masyarakat	
Penggunaan data statistik masih terbatas	Pemanfaatan data BPS dan hasil penelitian	Perencanaan berbasis bukti
Evaluasi program belum optimal	Penyusunan indikator monitoring dan evaluasi	Peningkatan akuntabilitas

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Akademisi melalui Penguatan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi sebagai Pembanding pada Forum Perangkat Daerah Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPDP) Kota Gunungsitoli Tahun 2027 telah terlaksana dengan baik dan memberikan kontribusi nyata terhadap proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Peran akademisi sebagai narasumber dan pembanding mampu memperkuat kualitas pembahasan program melalui pemberian masukan yang bersifat ilmiah, objektif, dan berbasis data, sehingga membantu perangkat daerah dalam menyusun program yang lebih terarah, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa forum menjadi media yang efektif untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam mewujudkan perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang partisipatif dan berbasis bukti (evidence-based planning). Berbagai rekomendasi yang diberikan, seperti penyempurnaan indikator kinerja, penguatan sinkronisasi antarperangkat daerah, penetapan prioritas program, serta pemanfaatan data statistik dan hasil kajian akademik, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan dan pencapaian target pembangunan ekonomi Kota Gunungsitoli.

Melalui kegiatan ini, kapasitas aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPDP) juga mengalami penguatan, terutama dalam memahami pentingnya keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan alokasi sumber daya. Dengan demikian, kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi perlu terus ditingkatkan sebagai bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi sekaligus upaya mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pembangunan ekonomi daerah yang inklusif, efektif, dan berkelanjutan.

Saran

1. Pemerintah Kota Gunungsitoli diharapkan terus melibatkan akademisi dan praktisi dalam setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah guna memperkuat kualitas analisis dan rekomendasi kebijakan.
2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu meningkatkan pemanfaatan data statistik, hasil penelitian, dan indikator kinerja yang terukur sebagai



- dasar penyusunan program pembangunan agar lebih efektif dan akuntabel.
3. Kegiatan Forum Perangkat Daerah hendaknya dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memperluas partisipasi pemangku kepentingan, sehingga menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif, adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, dan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan ekonomi Kota Gunungsitoli.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Arsyad, L. (2016). *Ekonomi pembangunan* (5th ed.). UPP STIM YKPN.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). *Pedoman penyusunan rencana pembangunan daerah*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2017). Designing and implementing cross-sector collaborations: Needed and challenging. *Public Administration Review*, 77(5), 647–663. <https://doi.org/10.1111/puar.12780>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). *OECD public governance reviews: Policy framework*. OECD Publishing.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158.
- Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2022 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah*. Kementerian Dalam Negeri.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2021). *Economic development* (13th ed.). Pearson.
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development*. UNDP.